

**Kepada  
Yth. Presiden RI Joko Widodo  
Di Jakarta**

Salam Sejahtera,

Terkait dengan kedatangan Presiden Jokowi kami sangat mengapresiasi khususnya di Wilayah Nabire tapi Wilayah Adat Mepago pada umumnya.

Rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo yang kami ketahui adalah untuk meresmikan beberapa fasilitas umum di wilayah Nabire seperti PLN dan RSUD yang dibangun lewat program pemerintah melalui APBN. Membangun daerah adalah kewajiban Pemerintah dan hak Masyarakat adalah untuk dapat menikmati pembangunan dari kewajiban pemerintah tersebut.

Presiden Joko Widodo yang kami hormati,  
Namun kami ingin meminta ketegasan sikap dan keputusan Presiden terkait dengan sejumlah kasus Pelanggaran HAM yang oleh KOMNAS HAM telah ditetapkan sebagai kasus Pelanggaran HAM BERAT terutama; Kasus Paniai Berdarah Tahun 2014 yang dijanjikan oleh Negara melalui presiden untuk diselesaikan namun hingga kini belum terselesaikan hingga hari ini. Dan perlu diingat oleh Presiden bahwa ini adalah janji yang menunjukkan wibawa Negara. Maka, kami menagih janji Presiden terkait penyelesaian kasus tersebut. Kami juga meminta Presiden memperhatikan kasus perampasan dan pencaplokan tanah yang diduga melibatkan oknum institusi Negara baik TNI dan Polri yang berkonspirasi bersama sejumlah investor di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan khusus wilayah Nabire dan Wilayah Adat Mepago pada umumnya seperti; Perkebunan Sawit di Wami Suku Yerisiam, konflik pertambangan di Mosairo Nifasi, Suku Wate dan juga sawit di Timika serta konflik-konflik lainnya.

Maka dengan kehadiran Presiden di Nabire ini, kami meminta secara resmi untuk Presiden mengintruksikan secara tertulis agar oknum-oknum TNI dan POLRI tidak lagi melakukan bisnis baik langsung maupun tidak langsung tapi juga melakukan pengamanan di perusahaan-perusahaan perkebunan sawit, pertambangan dan usaha-usaha lainya di wilayah Nabire, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika.

Karena harus disadari oleh presiden bahwa pendekatan aparat keamanan disektor bisnis telah menjadi Pintu Besar terjadinya pelanggaran HAM di wilayah Mepago.

Semoga kehadiran Presiden di Nabire ini dapat merubah situasi pengelolaan sumber daya alam yang menghormati masyarakat pemilik hak di wilayah Mepago.

Navandu, 20 Desember 2017

Salam dan Doa

Jhon NR Gobai  
Dewan Adat Wilayah Mepago